

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Justifikasi Penelitian	2
A. Mengapa Desentralisasi?	2
B. Desentralisasi: Mengapa Penting Bagi Timor Leste	7
C. Desentralisasi Administrasi Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno RAEOA-ZEESM.....	13
D. Bagaimana Tata Kelola Perbatasan Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno RAEOA-ZEESM.....	18
E. Bagaimana Perbatasan Daerah “Enclave” Oecusse-Ambeno, Timor Leste	22
F. Fokus Studi Pada Desentralisasi Tata Kelola Perbatasan Negara	25
1.3. Perumusan Masalah	28
1.4. Pertanyaan Penelitian	31

1.5. Tujuan Penelitian	32
1.6. Manfaat Penelitian	34
1.7. Kontribusi Penelitian	37
1.8. Review Literature dan Keaslian Studi	38
1.9. Beberapa Studi Tentang Perbatasan Timor Leste dengan Indonesia		47
1.10. Ringkasan	51
1.11. Sistematika Penulisan	52
BAB II. KERANGKA TEORI: SINERGITAS, DESENTRALISASI		
ADMINISTRASI, <i>GOVERNANCE</i> DAN TATA KELOLA PERBATASAN		
NEGARA		
2.1. Teori Sinergitas	55
A. Pengertian Sinergitas	55
B. Prinsip-Prinsip Sinergitas	57
2.2. Teori Desentralisasi	59
A. Konsep Dasar Desentralisasi	59
B. Desentralisasi Administrasi	66
C. Hubungan Desentralisasi – Dekonsentrasi	75
D. Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah		81
E. Pendekatan Pembangunan: Desentralisasi versus Sentralisasi		85
F. Esensi Desentralisasi dan Dekonsentrasi, Pengalaman Negara Lain		88
G. Desentralisasi: Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat		93
2.3. <i>Governance</i> dan <i>Good Governance</i>	101
A. Konsep <i>Governance</i>	101
B. <i>Good Governance</i> / Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		104
C. Sinergitas <i>Governance</i> dan Kegiatan Tata Kelola Perbatasan		109
D. Hubungan Desentralisasi dan Tingkatan Pemerintahan		113
2.4. Tata Kelola Perbatasan Negara	118
A. Pengertian Perbatasan	118

B. Arti Penting Daerah Perbatasan Negara	124
C. Desentralisasi Dalam Mengelola Kegiatan Pertahanan- Keamanan Perbatasan	126
D. Desentralisasi Dalam Mengelola Kegiatan Ekonomi Perbatasan	130
E. Desentralisasi Dalam Mengelola Kegiatan Sosial-Budaya Perbatasan	136
F. Hubungan Desentralisasi, <i>Governance</i> dan Tata Kelola Perbatasan Negara	141
2.5. Ringkasan	144
BAB III. KERANGKA PIKIR DAN METODOLOGI PENELITIAN	146
3.1. Pengantar	146
3.2. Kerangka Pikir Penelitian (Logical Framework of Research)	147
3.3. Metodologi Penelitian	160
A. Metode Yang Digunakan	160
B. Pemilihan Lokasi dan Fokus Penelitian	163
3.4. Definisi Konsep	164
A. Konsep Desentralisasi	164
B. Definisi Konsep Sinergitas Tata Kelola Perbatasan	165
3.5. Operasionalisasi Konsep / Variabel Penelitian.....	166
3.6. Sumber Data dan Cara Memperoleh Sumber Data	167
A. Informan / Sumber Informasi	167
B. Jenis Data / Informasi	169
3.7. Teknik Pengumpulan Data	170
3.8. Teknik Analisis dan Interpretasi Data Penelitian	174
BAB IV. KONDISI UMUM DAERAH ENCLAVE OECUSSE DAN WILAYAH PERBATASAN TIMOR LESTE - INDONESIA.....	177
4.1. Kondisi Umum	177

4.2. Sejarah, Wilayah Administratif dan Luas Daerah Enclave Oecusse	178
A. Sejarah Singkat Pembentukan Wilayah Administrasi Oecusse	178
B. Luas Wilayah Daerah Enclave Oecusse	182
4.3. Penduduk	184
A. Keadaan Penduduk Menurut Municipal dan Regional Spesial Oecusse	185
B. Keadaan Penduduk Oecusse Berdasarkan Kecamatan	186
4.4. Kondisi Pendidikan	188
A. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dasar.	189
B. Pendidikan Menengah: Jumlah Siswa/i, Tenaga Pengajar di Oecusse	190
C. Sekolah Teknik Vokasional: Jumlah Siswa/i, Tenaga Pengajar di Oecusse	190
D. Pendidikan Tinggi: Jumlah Mahasis/i, Dosen per Fakultas / Program di Dili Institute of Technology, Kampus Regional Enclave Oecusse	191
4.5. Kondisi Kesehatan	192
A. Pembangunan Kesehatan Região Oecusse	193
B. Personal Kesehatan di Região Oecusse	193
C. Fasilitas Kesehatan dan Klasifikasi Tenaga Medis	194
D. Personal Medis Kelahiran di Regiao Oecusse	195
4.6. Keadaan Migrasi	195
A. Mobilitas Warga Negara Asing dan Warga Negara Timor-Leste Berdasarkan Klasifikasi Masuk - Keluar di Região Oecusse, 2015.	196
1) Posto Sacato, Pante Macasar	196
2) Posto Bobometo, Oesilo	197
3) Posto Passabe, Passabe	199
4) Penumpang dan Muatan Masuk-Keluar Pelabuhan Oecusse .	200
4.7. Kondisi Transportasi	202

4.8. Kemiskinan	204
4.9. Kondisi Ekonomi.	205
A. Angkatan Kerja	205
B. Pekerja Luar Negeri dan Pelatihan di Regiao Oecusse	207
C. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar berdasarkan Jenis Kelamin (<i>Number of job seekers registered, by gender</i>)	208

BAB V. SINERGITAS DESENTRALISAI ADMINISTRASI DAN KEGIATAN PERTAHANAN-KEAMANAN DI DAERAH PERBATASAN DAERAH

ENCLAVE OECUSSE-TIMOR LESTE DENGAN INDONESIA	209
5.1. Pengantar	209
5.2. Desentralisasi dan Tujuan Otonomi Daerah	212
5.3. Hubungan Kekuasaan Pusat – Daerah Menurut UU No.11/2009 tentang Kewenangan Daerah dan Desentralisasi Administrasi Timor Leste	219
A. Definisi Desentralisasi Administrasi	219
B. Sinergitas Pusat-Daerah Dan Border Patrol Unit – BPU	224
5.4. Tata Pengelolaan Perbatasan Berdasarkan Kesepakatan RDTL – RI Tahun 2003	231
A. Pengelolaan Daerah Enclave Sebagai Kawasan Perbatasan Internasional	232
B. Kompleksitas Masalah Pengelolaan Perbatasan Antara Pemerintah Daerah VS Kondisi Keamanan	236
5.5. Sinergitas Kerjasama dan Diplomasi Timor Leste - Indonesia	239
A. Komunikasi dan Diplomasi Perbatasan	241
B. Koordinasi Antar Sektor dan Antar Daerah	252
C. Koodinasi Antar Negara	254
5.6. Sinergitas Desentralisasi dan Kegiatan Pertahanan-Keamanan Perbatasan	256

A. Komunikasi	256
B. Koordinasi	257
5.7. Sinergitas Desentralisasi, <i>Governance</i> Dengan Kegiatan		
Pertahanan-Keamanan	258
5.8. Ringkasan	262
BAB VI. SINERGITAS DESENTRALISASI ADMINISTRASI DAN		
KEGIATAN EKONOMI DI DAERAH PERBATASAN DAERAH ENCLAVE		
OECUSSE-TIMOR LESTE DENGAN NTT-INDONESIA		
		265
6.1. Pengantar	265
6.2. Desentralisasi Administrasi Menurut UU No.3/2014 Dalam		
Mengefektifkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan		267
A. Kebijakan Makro	268
B. Kebijakan Mikro	269
C. Pembukaan Pasar Tradisional Perbatasan		271
D. Pintu Lintas Batas Kawasan Perbatasan Daerah Enclave Oecusse		273
6.3. <i>Governance</i> Melalui Sinergitas dan Peran Aktor Utama Pelayanan		
Perbatasan.	279
A. Bea Cukai dan Keterbatasannya Serta Tuntutan Sistem		
Pengelolaan Internasional	280
B. Imigrasi dan Tugas Pengawasan Keluar-Masuk Orang Lintas Batas		285
C. Peran Karantina Dalam memastikan Masuknya Penyakit Menular		
dan Virus Berbahaya	288
D. Sinergitas Bea Cukai (<i>Customs</i>), Imigrasi (<i>Immigration</i>) dan		
Karantina (<i>Quarantine</i>)	291
6.4. Desentralisasi Administrasi, <i>Governance</i> dan Akses Ekonomi		
Perbatasan	298
A. Desentralisasi Administrasi dan Kegiatan Masyarakat Perbatasan		298
B. Akses Ekonomi Masyarakat Perbatasan Oecusse-Ambeno dan NTT		301

C. Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan Perbatasan Oecusse-Ambeno dengan NTT	304
D. Kerjasama Perdagangan di Daerah Perbatasan	311
E. Pasar Tradisional Perbatasan Sebagai Instrumen Pemasaran Bersama 312	
F. <i>Governance</i> dan Sinergitas Kegiatan Masyarakat Perbatasan	315
6.5. Ringkasan	316
BAB VII. SINERGITAS DESENTRALISASI ADMINISTRASI DAN HUBUNGAN SOSIAL BUDAYA DI DAERAH PERBATASAN DAERAH ENCLAVE OECUSSE-TIMOR LESTE DENGAN NTT-INDONESIA	
7.1. Pengantar	319
7.2. Desentralisasi Administrasi dan Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan	321
A. Desentralisasi dan Dinamika Masyarakat Lokal.....	321
B. Dinamika Masyarakat Lokal Menurut UU No.3/2014.....	324
7.3. Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Atoni Pah Meto Di Kawasan Perbatasan Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur	326
A. Letak Geografis	326
B. Sistem Budaya	327
C. Sistem Sosial	328
D. Kebudayaan Fisik	329
7.4. Sinergitas Melalui Komunikasi dan Koordinasi Masyarakat Perbatasan Oecusse-Ambeno	337
A. Sinergitas Sosial Terbangun Melalui Individu Di Perbatasan	338
B. Sinergitas Sosial Melalui Komunitas Di Perbatasan	339
C. Sinergitas Sosial Melalui Pemerintah Di Perbatasan	340
D. Sinergitas Melalui Komunikasi Ritual	344
7.5. Ringkasan	347

BAB VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	349
8.1. Kesimpulan	349
8.2. Implikasi – Implikasi dan Harapan Masa Depan.....	353
A. Implikasi Kebijakan	354
B. Implikasi Penelitian/Teoritis	357
C. Implikasi Metodologis	359
D. Implikasi Pembangunan Wilayah Perbatasan.....	360
8.3. Keterbatasan Penelitian	361
8.4. Kebaruan / Novelty	362
8.5. Keunikan Penelitian	364
8.6. Policy Agenda	364
8.7. Rekomendasi – Rekomendasi	365

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1: Arus Desentralisasi	68
Bagan 2.2: Hubungan antara Desentralisasi, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	101
Bagan 2.3: Tingkatan Pemerintahan	114
Bagan 3.1: Kerangka Konseptual	150

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Derajat Otonomi Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik yang bersifat <i>statutory services</i>	94
Gambar 2.2 Derajat Otonomi Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik yang bersifat <i>Discretionary</i>	96
Gambar 2.3 Keterkaitan actor Pemerintahan Kota / <i>Urban actors</i>	103
Gambar 2.4 Characteristics of good governance	109
Gambar 2.5 Hubungan Antar Sektor dalam <i>Governance</i>	111
Gambar 2.6 Ilustrasi: <i>Boundary Making Theory</i>	124
Gambar 2.7 Pola interaksi <i>state-society</i> dan kebijakan desentralisasi pada rezim demokrasi	139
Gambar 4.1 Peta Timor Leste dalam Perbatasan dengan NTT Indonesia	183
Gambar 4.2 Peta Distrito Oecusse-Ambeno	184
Gambar 5.1 Peta Perbatasan Darat Citrana dan Oben	252

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Korelasi (Koherensi) antar Latar Belakang, Fokus, Tujuan dan Pertanyaan Penelitian 36
Tabel.1.2	<i>Three interconnected dimensions in cross-border governance in Europe</i> 40
Tabel 2.1	Kategori Desentralisasi menurut Tujuan dan Instrumen 66
Tabel 2.2	Ragam Definisi dan Interpretasi Desentralisasi – Dekonsentrasi 76
Tabel 2.3	Komparasi Desentralisasi – Dekonsentrasi 80
Tabel 2.4	Tipologi Daerah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 87
Tabel 2.5	Sharing tanggungjawab antar level pemerintahan (kasus beberapa negara) 91
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data 172
Tabel 4.1	Struktur Administrasi Regional Oecusse-Ambeno Berdasarkan luas wilayah Kecamatan 183
Tabel. 4.2	Keadaan Penduduk Menurut Municipal dan Regional Special Oecusse 185
Tabel 4.3	Keadaan Penduduk Oecusse Berdasarkan Kecamatan 187
Tabel 4.4	Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa/i, Tenaga Pengajar di Região Oecusse 189
Tabel 4.5	Pendidikan Menengah: Jumlah Siswa/i, Tenaga Pengajar di Oecusse 190
Tabel 4.6	Sekolah Teknik Vokasional: Jumlah Siswa/i, Tenaga Pengajar di Oecusse 190
Tabel 4.7	Pendidikan Tinggi: Jumlah Mahasiswa/i, Dosen per

	Fakultas / Program di DIT Oecusse	191
Tabel 4.8	Pembangunan Kesehatan Região Oecusse, 2015	193
Tabel 4.9	Personal Kesehatan di Região Oecusse	193
Tabel 4.10	Fasilitas Kesehatan dan Klasisifaki Tenaga Medis	194
Tabel 4.11	Personal Medis Kelahiran di Regiao Oecusse	195
Tabel 4.12	Posto Sacato, Pante Macasar	196
Tabel 4.13	Posto Bobometo, Oesilo	197
Tabel 4.14	Posto Passabe	199
Tabel 4.15	Penumpang dan Muatan Masuk-Keluar Pelabuhan Oecusse	200
Tabel 4.16	Número de Pessoas Registadas á Procura de Emprego por Sexo em Região Oecusse, 2015. (Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin, Regional Oecusse, 2015)	205
Tabel 4.17	Ema ne'ebe buka Servico iha Rai Laran no ba Rai Liur no Formação iha Região Oecusse, 2015. (Orang yang bekerja di Luar Negeri dan Pelatihan di Regiao Oecusse, 2015)	207
Tabel 4.18	Jumlah Pencari Kerja Timor Leste terdaftar berdasarkan Jenis Kelamain	208
Tabel 5.1	Konsep Desentralisasi dan Tujuan Otonomi Daerah	213
Tabel 5.2	Persepsi dan penilaian konsep dan tujuan otonomi Daerah	216
Tabel 5.3	Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat – Regional Dalam Pengelolaan Perbatasan	225
Tabel 5.4	Kerjasama Border Patrol Unit – Pemerintah Regional di Perbatasan	227
Tabel 5.5	Daftar kecamatan yang berbatasan langsung	232
Tabel 5.6	Titik penyeberangan Adat dan pasar tradisional.....	233
Tabel 5.7	Lokasi <i>Border Crossing Pass</i> RDTL-RI	235
Tabel 5.8	Kompleksitas Sinergitas Pemerintah Regional dan Keamanan Perbatasan	237

Tabel 5.9	Dasar Kerjasama dan Diplomasi Perbatasan	240
Tabel 5.10	Wewenang Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Regional Enclave Oecusse Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Bidang Pertahanan	261
Tabel 6.1	Peran pemerintah dan terbentuknya pasar tradisional perbatasan	276
Tabel 6.2	<i>Governance</i> Melalui Tanggungjawab aktor pengelola perbatasan negara	279
Tabel 6.3	Peran dan fungsi Bea Cukai Dalam pengelolaan perbatasan	280
Tabel 6.4	Peran dan fungsi Keimigrasian Dalam pengelolaan perbatasan	286
Tabel 6.5	Peran dan fungsi Karantina	289
Tabel 6.6	Eksistensi CIQ dalam Kepabeanan di Timor Leste.....	295
Tabel 6.7	Jenis akses Ekonomi masyarakat Oecusse-Ambeno dengan TTU-Kupang	302
Tabel 6.8	Jenis barang dan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan	304
Tabel 6.9	Produksi Padi Sawah, 2016	305
Tabel 6.10	Produksi Padi Ladang, 2016	305
Tabel 6.11	Jenis peternakan besar	307
Tabel 6.12	Tipe Usaha Manufaktur	309
Tabel 7.1	Sinergitas individu, peran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah	337
Tabel 7.2	Sinergitas Pemerintah Pusat – Daerah Dalam Proses Rekonsiliasi Orang Timor di Perbatasan	341

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	The Association of South East Asian Nations
BIMP-EAGA	Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Philippine – East ASEAN Growth Area
BLC	Border Liasion Committee
CIQS	Customs, Imigration, Quarantine, Security
EU	The European Union
FGD	Focus Group Discussion
IMT-GT	Indonesia, Malaysia and Thailand – Growth Triangle)
JBC	Joint Border Committee
JMC	Joint Ministerial Commission
KAPET	Kawasan Pengembangan Terpadu
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAEOT	Ministerio da Administracao Estatal e Ordenamento Territorio
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	Nusa Tenggara Timur
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEDD	Planu Estrategia Desenvolvimento Distritu
PEDN	Planu Estrategia Desenvolvimento Nasional
PKF	Peace Keeping Force
PLB	Paspor Lintas Batas
RDTL	Republica Democratica de Timor Leste
RI	Republik Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIJORI	Singapura, Johor dan Riau
TCL	The Tactical Coordination Line
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TSC-BDR	Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation
TTU	Timor Tengah Utara
UNAMET	The United Nations Mission in East Timor
UNTAET	The United Nation Transition Administration of East Timor
UPF	Unidade de Patrulamento de Fronteiras
UPN	Universitas Pembangunan Nasional
UNDP	The United Nations of Development Program
UNESC	The United Nations of Education and Social Committee
UU	Undang-undang